

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2023). Metode Penelitian Hukum (Cet. ke-15). Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhari, M. T. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. Jambi: Sonpedia Publishing.
- Djulaeka, D. R. (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. (2022). Pedoman Penulisan Tugas Akhir. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Faure, M. (2023). Environmental Law and Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamzah, A. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement). Bandung: PT Alumni.
- Hamzah, A. (2024). Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, S. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., dkk. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (Cet. ke-1). Mataram: Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

- Rahmadi, T. (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi, T. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia (Edisi Ketiga)*. Depok: Rajawali Pers.
- Rangkuti, S. S. (2018). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santosa, M. A. (2001). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum (Cet. ke-3)*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A. A. (2009). *Konsep Dasar IPS*. Jakarta: Universitas Terbuka.

B. Jurnal / Skripsi / Karya tulis ilmiah

- Andini, D. (2023). Efektivitas UU No. 32 Tahun 2009 dalam Kasus Karhutla. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 76.
- Arianti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 3. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Arliman S., L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Indonesia. *Jurnal Dialogia*, 11(1), 9–10. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Azizah, N., & Rifki, M. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 112.
- Harahap, E. H. (2021). *Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/12729>
- Hidayat, R., & Arifin, R. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 185. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10478>

- Kaligis, R. (2013). Fungsi Penyelidikan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(4), 16–17. <https://www.neliti.com/publications/3054/>
- Purnomo, E., dkk. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Doktrinal*, 5(1), 42. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/download/3894/2588>
- Rahmawati, & Jalil, A. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah. *Hasanuddin Law Review*, 9(2), 204.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Korporasi Dalam Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dharma Agung*, 29(1), 76. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/download/5401/4461/>
- Suprpto, N. K. (2022). Dimensi Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 44.
- Wibisana, A. G. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Antara Norma dan Realitas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 585. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/>

C. Laporan dan Dokumen Resmi

- Badan Penanggulangan Bencana Aceh. (2023). *Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Aceh Tahun 2023*. Banda Aceh: BPBA.
- Badan Penanggulangan Bencana Aceh. (2024). *Laporan Tahunan Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh Tahun 2023*. Banda Aceh: BPBA.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah. (2024). *Laporan Evaluasi Penanganan Bencana Tahun 2024*. Takengon: BPBD Aceh Tengah.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah. (2024). *Laporan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan 2021–2024*. Takengon: BPBD Aceh Tengah.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah. (2024). *Laporan Tahunan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024*. Takengon: BPBD Kabupaten Aceh Tengah.
- Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah. (2026). *Rekapitulasi Titik Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021–2025*. Data Penelitian.

Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah. (2024). *Laporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Tahun 2023*. Takengon: DLH Aceh Tengah.

Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah. (2024). *Laporan Sosialisasi dan Pengawasan Karhutla Tahun 2024*. Takengon: DLH Aceh Tengah.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: IPCC.

Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. (2024). *Laporan Tahunan Penanganan Perkara Lingkungan Tahun 2024*. Takengon: Kejari Aceh Tengah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2023*. Jakarta: KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Statistik Kehutanan Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. (2024). *Profil Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023*. Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

E. Wawancara

Abdullah, Masyarakat di Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Aceh Tengah. Wawancara. Kamis, 12 Maret 2026.

Bripka Syuhada, Anggota Unit Idik II Tipidter Sat Reskrim Polres Aceh Tengah. Wawancara. Kamis, 26 Februari 2026.

Dedet Darmandi, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Wawancara. Rabu, 1 April 2026.

Hajali Amna, Kepala Resort Polisi Hutan Birah Panyang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Aceh. Wawancara. Rabu, 8 April 2026.

Heriyanto, Petugas Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Wawancara. Senin, 16 Maret 2026.

Iwan Ilham Abadi, Kabid Kedaruratan Logistik Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Aceh Tengah. Wawancara. Senin, 16 Maret 2026.

Iwan Tanmiko, Petugas Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Wawancara. Senin, 16 Maret 2026.